

DINAMIKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI REMAJA DALAM ANALISIS KOMPARATIF HAK REMAJA, ANAK, DAN ORANG DEWASA TERHADAP KEPENTINGAN KHUSUS DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

THE DYNAMICS OF LEGAL PROTECTION FOR ADOLESCENTS IN A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RIGHTS OF ADOLESCENTS, CHILDREN, AND ADULTS TO SPECIAL INTERESTS IN THE NATIONAL LEGAL SYSTEM

Iwan Riswandie ^{1*}

Hening Putri Maharani ^{2*}

^{*1} Universitas Islam Kalimantan
MAB Kalimantan Selatan

^{*2} Universitas Lambung
Mangkurat Banjarmasin

*email:
iwanriswandie2@gmail.com

*email:
heningputri22@gmail.com

Abstrak

Ketidakpedulian masyarakat terhadap kesadaran hukum menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap norma hukum. Tantangan dalam memperkenalkan kesadaran hukum semakin kompleks, terutama karena sifat ilmu hukum yang *sui generis*. Dalam tahap perkembangan remaja, pentingnya hukum perlindungan yang mempertimbangkan karakteristik unik remaja menjadi krusial dalam membentuk masyarakat yang lebih baik.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif, menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Perbedaan perlakuan hukum terhadap remaja mencerminkan dinamika dan tantangan unik mereka. Dalam mengatasi ketidaksetaraan perlindungan hukum, diperlukan upaya bersama dari masyarakat dan pemerintah untuk mendorong perubahan menuju sistem hukum yang lebih inklusif. Perlindungan remaja harus diperluas, memastikan pengakuan hak dan kewajiban hukum mereka. Perbandingan perlindungan antara remaja, anak, dan orang dewasa harus mempertimbangkan kompleksitas dan kekhasan setiap kelompok. Pemahaman mendalam terhadap perkembangan psikososial remaja menunjukkan perlunya diferensiasi perlindungan remaja dari anak-anak dan orang dewasa. Melalui langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif remaja dan membangun fondasi bagi generasi yang tangguh dan bertanggung jawab dalam masyarakat.

Kata Kunci:

Perlindungan
Remaja
Hukum
Hak
Tantangan.

Keywords:

Protection
Juvenile
Legal
Claim
Challenge.

Abstract

People's indifference to legal awareness leads to a lack of understanding of legal norms. The challenges in introducing legal awareness are increasingly complex, mainly due to the sui generis nature of legal science. In this stage of juvenile development, the importance of protection laws that consider the unique characteristics of juvenile becomes crucial in shaping a better society.

This research adopts a normative legal research approach, using literature study technique for a collecting legal materials. The different legal treatment of juvenile reflects their unique dynamics and challenges. In addressing inequalities in legal protection, a concerted effort from society and government is need to drive change towards a more inclusive legal system. The protection of juveniles should be expanded, ensuring the recognition of their legal claims and obligations. A comparison of protection between juvenile, children and adults should take into account the complexity and peculiarities of each group. A deep understanding of juvenile psychosocial development demonstrates the need for differentiation of juvenile protection from children and adults. Through these measures, we can create an environment that supports the positive growth of juvenile and builds the foundation for a resilient and responsible generation in society.

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum terkait dengan cara orang berinteraksi satu sama lain sehingga istilah ini sering dibicarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemahaman tentang hukum yang berlaku atau diharapkan adalah bagian dari nilai-nilai yang melekat pada manusia yang dikenal sebagai kesadaran hukum. Ketidakpedulian masyarakat terhadap kesadaran hukum dapat menyebabkan masyarakat yang kurang memahami norma hukum. Sangat penting bagi anak-anak untuk menjadi sadar hukum, dan mereka tidak perlu menunggu pelanggaran terjadi atau penegak hukum mengambil tindakan. Pencegahan dianggap penting dan dapat dimulai dari keluarga, komunitas terkecil. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan pelanggaran hukum akan berkurang, sehingga kehidupan menjadi lebih sesuai dengan standar. (Pandu, 2023)

Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pada pendidikan formal di bangku sekolah saja, tetapi juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. (Timore dkk, 2033) Lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal perlu bekerja sama dalam mengembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan kepada anak-anak agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa kebutuhan akan peraturan hukum. Dengan demikian, kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini. (Habibi, 2020) Terdapat beberapa jenis pendidikan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum, baik untuk remaja maupun orang dewasa, seperti pendidikan formal, nonformal, dan informal. Namun, dalam mengembangkan kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini, terdapat hambatan yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum, serta kurangnya dukungan dari pemerintah dan lembaga pendidikan. Perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan kesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini.

Munculnya tantangan dalam memperkenalkan kesadaran hukum menjadi semakin kompleks, terutama mengingat sifat ilmu hukum yang bersifat *sui generis*, atau sebagai suatu entitas yang khas dan perlu dipelajari sebagai disiplin ilmu tersendiri. (Qamar, dkk, 2023) Kesulitan ini semakin diperparah oleh sifat hukum yang senantiasa berubah dan semakin kompleks seiring berjalannya waktu. Pengaruh lingkungan memainkan peran signifikan dalam dinamika ini. Dampak dari globalisasi menjadi kontributor utama yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan kita di seluruh dunia. Pengaruh ini tidak hanya membawa dampak positif, namun juga diiringi oleh dampak negatif.

Kehidupan manusia melewati fase transisi atau perubahan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Remaja adalah subjek dari proses pendewasaan tersebut, dan mereka mengalami berbagai macam perubahan mulai dari penampilan fisik, psikologis, dan psikososial. Remaja juga mengalami masa pancaroba, yang tentu saja akan memengaruhi status fisik dan mental mereka, sehingga dapat memengaruhi kehidupan sosial mereka. Selain itu, mereka cenderung mulai beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, mencari identitas baru, dan membentuk hubungan baru. (Nasution dkk, 2023) Fase ini tidak hanya mencakup pertumbuhan fisik yang pesat, tetapi juga pergeseran dalam pola pikir dan emosi yang sering kali membingungkan. Dalam konteks ini, diperlukan perlindungan khusus untuk membantu remaja mengelola perubahan tersebut dengan sehat. Perlindungan tersebut mencakup dukungan emosional, akses ke informasi yang tepat, dan lingkungan yang mendukung agar mereka dapat melewati fase ini tanpa merasa terisolasi atau tidak siap menghadapi perubahan tersebut.

Keberagaman dalam tahapan perkembangan remaja menuntut penyusunan hukum perlindungan yang mempertimbangkan karakteristik unik mereka. Tahap ini melibatkan perubahan fisik, psikologis, dan hormonal yang memerlukan perlindungan khusus agar remaja dapat mengelola perubahan tersebut dengan sehat. Kerangka hukum perlindungan remaja harus dirancang dengan memperhatikan keunikan dan kebutuhan spesifik dari fase transisi ini,

sehingga memberikan perlindungan yang efektif dan mendukung perjalanan pertumbuhan mereka. Selain itu, perlindungan remaja juga melibatkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya untuk menyediakan perlindungan yang efektif. Menciptakan kesadaran akan perubahan ini dan mempromosikan pemahaman bahwa perasaan dan tantangan yang dihadapi oleh remaja adalah bagian normal dari perkembangan mereka dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman bagi mereka menjalani fase ini.

Remaja, sebagai kelompok usia yang tengah menghadapi fase transisi penting, menunjukkan rentan terhadap berbagai risiko dan tantangan. Salah satu risiko yang signifikan adalah paparan terhadap kejahatan, pelecehan, atau eksploitasi yang lebih tinggi. Untuk melindungi remaja dari menjadi korban tindak kejahatan atau situasi berisiko lainnya, perlindungan menjadi suatu keharusan. Upaya ini melibatkan pemahaman dan penanganan proaktif terhadap lingkungan sekitar remaja, memberikan mereka pemahaman yang memadai tentang cara melaporkan situasi berisiko, serta membentuk kepekaan terhadap situasi yang dapat membahayakan keamanan dan kesejahteraan mereka.

Selain risiko fisik, tantangan kesehatan mental dan emosional juga sering dihadapi oleh remaja. Depresi, kecemasan, dan tekanan akademis adalah beberapa masalah kesehatan mental yang dapat memengaruhi kesejahteraan mereka. Ditekankan perlindungan yang melibatkan penanganan holistik, termasuk penyediaan akses yang adil terhadap layanan kesehatan mental dan pembentukan lingkungan yang positif. Memastikan remaja memiliki akses ke dukungan kesehatan mental yang memadai dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif adalah elemen kunci dalam melindungi mereka dari dampak negatif tantangan kesehatan mental dan emosional.

Perlindungan remaja melibatkan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap kesehatan mental dan emosional mereka. Upaya perlindungan ini melibatkan langkah-langkah komprehensif pencegahan, termasuk edukasi tentang risiko dan tanda-tanda bahaya, sekaligus pembangunan lingkungan yang mendukung. Hal ini menjadi langkah krusial dalam memastikan perlindungan menyeluruh bagi remaja selama fase penting ini dalam perkembangan mereka. Dalam konteks ini, upaya untuk memberikan akses yang merata dalam hal pendidikan dan pelatihan keterampilan juga menjadi bagian integral dari perlindungan remaja. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu remaja mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam masa depan. Perlindungan remaja tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan, tetapi juga melibatkan perlindungan terhadap tantangan perkembangan dan kesejahteraan mental remaja, dengan pengakuan akan keunikan dan risiko khusus yang mungkin mereka hadapi selama fase transisi mereka. Dengan demikian, keseluruhan usaha perlindungan remaja menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan perlindungan menyeluruh terhadap berbagai aspek kehidupan mereka.

Di sisi lain, Undang-undang perlindungan anak, yaitu UU No. 23 Tahun 2002, menjadi dasar untuk menjamin perlindungan hak-hak anak. (Munajat, 2023) Dalam Pasal 1 ayat (2) UU tersebut, dijelaskan bahwa perlindungan anak merujuk pada tindakan yang dilakukan untuk memastikan dan menjaga anak-anak serta hak-hak mereka, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, UU tersebut turut menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. (Nugraha, 2023) Menurut UU tersebut perlindungan anak menekankan perlindungan hak-hak dasar anak. Ini mencakup hak atas pendidikan yang layak, kesehatan yang optimal, dan perlindungan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Fokusnya bukan hanya pada aspek fisik anak, tetapi juga pada kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial mereka. Perlindungan dirancang untuk mencapai tujuan holistik yang memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan aman.

Sementara itu, bagi orang dewasa, perlindungan difokuskan pada hak-hak sipil dan politik mereka. Sebagai individu yang telah melewati masa remaja, perlindungan dewasa lebih berorientasi pada aspek-aspek yang terkait dengan kehidupan dewasa. Ini mencakup hak-hak sipil, kebebasan, dan hak-hak lain yang sesuai dengan tahap kehidupan mereka saat ini. Sebagai bagian dari masyarakat dewasa, perlindungan bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak individu dewasa dihormati dan dilindungi sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Urgensi perlindungan remaja semakin mencuat ketika ditempatkan dalam konteks perlindungan anak dan dewasa yang telah menjadi fokus utama kebijakan dan praktik hukum. Meskipun perlindungan anak dan dewasa telah mengakui kebutuhan dan hak-hak khusus dari kedua kelompok usia tersebut, perlindungan remaja memerlukan perhatian tersendiri. Kehidupan remaja sering kali dipenuhi dengan tantangan yang unik, seperti eksplorasi identitas, tekanan sosial, dan risiko perilaku yang dapat memengaruhi perkembangan mereka. Oleh karena itu, untuk mencegah risiko-risiko tersebut, perlu difokuskan upaya perlindungan khusus pada remaja.

Dengan memusatkan perhatian pada perlindungan remaja, kita dapat mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mencegah berbagai risiko yang mungkin memengaruhi perkembangan mereka. Langkah-langkah proaktif ini bukan hanya untuk mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin muncul, tetapi juga untuk memberikan dukungan yang diperlukan agar remaja dapat tumbuh dan berkembang secara positif. Ini melibatkan penciptaan lingkungan yang mendukung perkembangan kognitif, emosional, dan sosial mereka. Oleh karena itu, urgensi perlindungan remaja tidak hanya berkaitan dengan respons terhadap potensi risiko, tetapi juga dengan penyediaan landasan positif yang diperlukan agar mereka dapat menghadapi masa transisi ini dengan lebih baik.

Upaya perlindungan remaja juga dapat memainkan peran kunci dalam pembentukan masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan. Dengan memberikan perhatian yang adekuat terhadap perlindungan remaja, kita tidak hanya menciptakan individu yang kuat secara mental dan emosional, tetapi juga mendorong terbentuknya komunitas yang lebih sehat secara keseluruhan. Inisiatif perlindungan remaja yang sukses dapat merangkul kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan mendukung bagi semua kelompok usia.

Dengan demikian, urgensi perlindungan remaja menjadi semakin penting di tengah upaya perlindungan anak dan dewasa. Hal ini bukan hanya sebagai tanggapan terhadap potensi risiko, tetapi juga sebagai investasi dalam pembangunan masa depan masyarakat. Dengan memberikan perhatian dan dukungan yang tepat pada remaja, kita dapat membentuk generasi yang tangguh, penuh potensi, dan mampu membawa perubahan positif dalam dinamika sosial dan budaya.

METODOLOGI

Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, peneliti menggunakan metodologi penelitian hukum normatif berdasarkan persyaratan undang-undang atau bahan dan konsep hukum lainnya. Eksplorasi ini menggunakan ujian yang memukau dengan mengumpulkan informasi penelitian yang diperoleh dari web yang berkaitan dengan masalah ujian. Metodologi yang digunakan adalah standarisasi eksplorasi halal dengan metodologi subjektif yang digunakan untuk menganalisis substansi analisis studi pustaka dan perundang-undangan dengan tujuan mencapai pengetahuan lebih luas, Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen peraturan, literatur terkait yang dilakukan melalui data base online, studi literatur di perpustakaan, dan browsing internet untuk mencari materi yang sesuai dengan pembahasan mendalam penulis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan bagi para pembaca nanti, apa kewajiban dan kewenangan notaris yang diberhentikan sementara akibat sanksi yang dilakukannya, dan memberikan perlindungan

hukum terhadap kliennya. Setelah data terkumpul, Setelah itu dikaji secara deskriptif dan kualitatif yaitu dengan metode analisis data yang melibatkan uraian atau penyusunan data secara sistematis untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dalam mengeksplorasi permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, penulis memilih pendekatan penelitian hukum normatif untuk menyelidiki setiap aspek yang relevan. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis konseptual dan referensi pada peraturan perundang-undangan. Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto mengungkapkan bahwa “*Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma seperti asas-asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).*” (Muhaimin, 2020) Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer, sebagai inti penelitian, adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi sumber utama yang bersifat otoritatif. Bahan hukum sekunder, di sisi lain, digunakan sebagai pendukung, memberikan penjelasan, teori-teori hukum, dan pandangan dari literatur, ahli hukum, dan sarjana terkait.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Tahap awal melibatkan pengkajian mendalam terhadap permasalahan yang akan diteliti, disusul dengan pencatatan, pengutipan, dan ringkasan informasi dari literatur-literatur yang relevan. Dalam menganalisis bahan hukum yang terkumpul, penulis menggunakan teknik argumentasi dan interpretasi hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif dari peneliti. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang substansial dalam pemahaman dan solusi terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Urgensi Perlindungan Remaja dalam Sistem Hukum Nasional

a. Ketidaksetaraan Perlindungan Hukum

Ketidaksetaraan perlindungan hukum mengacu pada ketidakadilan dalam memberikan perlindungan hukum kepada individu atau kelompok tertentu. Situasi ini bisa muncul akibat adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, keterbatasan fisik dan mental, ketidaksetaraan kekuasaan, serta pengalaman kekerasan dari pihak pelaku. Dalam lintasan kompleks sistem hukum nasional, remaja seringkali menemui ketidaksetaraan perlindungan yang mungkin menjadi hambatan dalam perjalanan mereka menuju kedewasaan. (Nessi Meilan dkk, 2019)

Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk diskriminasi, keterbatasan akses atau partisipasi dalam sistem peradilan, serta perlakuan yang tidak setara dalam pemberian hak dan kewajiban hukum. Faktor-faktor seperti usia, status sosial, atau latar belakang ekonomi juga dapat mempengaruhi ketidaksetaraan perlindungan hukum yang dialami oleh remaja.

Ketidaksetaraan perlindungan hukum remaja merujuk pada situasi di mana remaja mengalami ketidakadilan dalam perlakuan hukum atau kurangnya perlindungan hukum yang memadai, sehingga hal ini menjadi suatu aspek yang esensial untuk dipahami dan dieksplorasi. Perbedaan perlakuan hukum terhadap remaja dibandingkan dengan kelompok usia lain mencerminkan dinamika dan tantangan unik yang dihadapi oleh remaja dalam perjalanan menuju kedewasaan. Salah satu aspek yang mencolok adalah terkait dengan sistem peradilan pidana. Remaja seringkali dihadapkan pada ketidaksetaraan perlakuan dalam penanganan kasus hukum, di mana beberapa negara mungkin mengenakan hukuman yang sama kepada remaja seperti yang dikenakan pada orang dewasa. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam perlindungan hak-hak remaja, karena remaja memiliki kebutuhan dan hak-hak khusus yang perlu

dipertimbangkan dalam penanganan kasus hukum. Remaja juga mungkin menghadapi perlakuan yang kurang memperhatikan tingkat kematangan dan pemahaman mereka terhadap konsep hukum, sehingga hak-hak dan kebutuhan khusus mereka tidak terpenuhi dengan baik.

Remaja sebagai kelompok yang masih dalam proses pembentukan karakter dan perlu mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka, sehingga pendekatan hukum yang diambil seharusnya lebih berfokus pada rehabilitasi dan pendidikan daripada memberlakukan hukuman yang bersifat punitif. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam penerapan hukuman, rehabilitasi, dan akses terhadap bantuan hukum yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan remaja. Hal ini dapat memengaruhi proses rehabilitasi dan reintegrasi remaja ke dalam masyarakat, serta berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak mereka.

Selain itu, data dari survei "Perundungan Online dan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Online" yang dilakukan oleh *Child Fund* pada bulan Juli-Oktober 2022 menyoroti urgensi perlindungan remaja dalam menghadapi risiko perundungan, kekerasan, dan eksploitasi seksual dalam ranah daring. Survei ini melibatkan 1.610 pelajar dan mahasiswa berusia 13-24 tahun di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk DKI Jakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung. Menurut Hanneke Oudkerk, *Country Director Indonesia Child Fund Internasional*, hasil survei ini memperlihatkan bahwa risiko yang dihadapi remaja dalam konteks daring cukup signifikan. Fakta bahwa hampir setengah dari responden pernah menjadi pelaku perundungan daring menyoroti perlunya pendekatan perlindungan yang holistik. Selain itu, angka hampir 60 persen yang mengakui menjadi korban perundungan daring dalam tiga bulan terakhir memberikan gambaran mendalam mengenai kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh remaja dalam dunia maya. Urgensi perlindungan remaja menjadi semakin nyata mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perundungan daring terhadap kesejahteraan dan perkembangan mereka. Perlindungan yang memadai dan upaya pencegahan menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan daring yang aman dan mendukung bagi remaja. (Sonya Hellen, (2022))

b. Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Remaja

Dalam rangka meningkatkan keadilan dan perlindungan hak-hak remaja, perlu adanya upaya untuk memperluas perlindungan hukum bagi remaja dan memastikan bahwa sistem hukum mampu memperhatikan kebutuhan dan hak-hak khusus mereka. Hal ini mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk merinci dan menyelidiki pendekatan hukum yang lebih sensitif dan responsif terhadap keunikan dan tahap perkembangan remaja.

Pemenuhan hak-hak dan kebutuhan khusus remaja, termasuk hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak-hak lain yang mungkin berbeda dari kelompok usia lain, merupakan aspek penting dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan remaja. Hak pendidikan remaja mencakup akses yang adil dan setara terhadap pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan pendidikan seksual yang komprehensif. Selain itu, pemenuhan hak kesehatan remaja meliputi akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, konseling, dan informasi kesehatan yang akurat. Hal ini penting mengingat masa remaja merupakan periode penting dalam pembentukan identitas dan kesehatan fisik serta mental. Sesuai dengan pemenuhan hak kesehatan remaja yang diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa "Setiap individu memiliki hak atas kesehatan." Selain itu, pasal 126 hingga 140 mengatur mengenai kesehatan ibu, bayi, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat (disabilitas), yang merupakan sebagian dari kelompok masyarakat yang rentan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa "Setiap individu yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih mengenai kekhususannya." Namun, hingga saat ini, perhatian yang diberikan oleh negara terhadap kelompok rentan dinilai belum mencukupi dalam memberikan

perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan. Salah satu potensi penyebabnya adalah kurangnya pemahaman terhadap kerentanan dan karakteristik khusus yang dimiliki oleh kelompok rentan tersebut. (Limbong R.J, 2020: 10)

Melalui pemenuhan hak kesehatan menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan remaja secara menyeluruh. Upaya pemenuhan hak-hak dan kebutuhan khusus remaja juga harus memperhatikan perbedaan individual, termasuk remaja dengan kebutuhan khusus, seperti anak berkebutuhan khusus, perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan remaja yang rentan terhadap pergaulan bebas. Selain itu, pembahasan tentang pemenuhan hak-hak dan kebutuhan remaja juga perlu melibatkan aspek-aspek lain, seperti hak partisipasi, hak privasi, dan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Pemahaman yang komprehensif terhadap hak-hak ini memungkinkan pembentukan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif, mempersiapkan remaja untuk memasuki tahap dewasa dengan kemandirian dan kesadaran yang tinggi mengenai hak-hak mereka.

c. Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Remaja

Dalam rangka meningkatkan keadilan dan perlindungan hak-hak remaja, perlu adanya upaya untuk memperluas perlindungan hukum bagi remaja dan memastikan bahwa sistem hukum mampu memperhatikan kebutuhan dan hak-hak khusus mereka. Hal ini mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk merinci dan menyelidiki pendekatan hukum yang lebih sensitif dan responsif terhadap keunikan dan tahap perkembangan remaja.

Pemenuhan hak-hak dan kebutuhan khusus remaja, termasuk hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak-hak lain yang mungkin berbeda dari kelompok usia lain, merupakan aspek penting dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan remaja. Hak pendidikan remaja mencakup akses yang adil dan setara terhadap pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan pendidikan seksual yang komprehensif. Selain itu, pemenuhan hak kesehatan remaja meliputi akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, konseling, dan informasi kesehatan yang akurat. Hal ini penting mengingat masa remaja merupakan periode penting dalam pembentukan identitas dan kesehatan fisik serta mental. Sesuai dengan pemenuhan hak kesehatan remaja yang diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa "Setiap individu memiliki hak atas kesehatan." Selain itu, pasal 126 hingga 140 mengatur mengenai kesehatan ibu, bayi, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat (disabilitas), yang merupakan sebagian dari kelompok masyarakat yang rentan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa "Setiap individu yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih mengenai kekhususannya." Namun, hingga saat ini, perhatian yang diberikan oleh negara terhadap kelompok rentan dinilai belum mencukupi dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan. Salah satu potensi penyebabnya adalah kurangnya pemahaman terhadap kerentanan dan karakteristik khusus yang dimiliki oleh kelompok rentan tersebut. (Limbong R.J)

Melalui pemenuhan hak kesehatan menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan remaja secara menyeluruh. Upaya pemenuhan hak-hak dan kebutuhan khusus remaja juga harus memperhatikan perbedaan individual, termasuk remaja dengan kebutuhan khusus, seperti anak berkebutuhan khusus, perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan remaja yang rentan terhadap pergaulan bebas. Selain itu, pembahasan tentang pemenuhan hak-hak dan kebutuhan remaja juga perlu melibatkan aspek-aspek lain, seperti hak partisipasi, hak privasi, dan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Pemahaman yang komprehensif terhadap hak-hak ini memungkinkan pembentukan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif, mempersiapkan remaja untuk memasuki tahap dewasa dengan kemandirian dan kesadaran yang tinggi mengenai hak-hak mereka.

2. Parameter Perlindungan Remaja Dibandingkan Perlindungan Anak dan Orang Dewasa

a. Definisi dan Ruang Lingkup Perlindungan

Perlindungan anak, remaja, dan orang dewasa memiliki makna dan ruang lingkup yang berbeda. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah individu yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. (Patepa, T.I.F.D, 2020: 95) Perlindungan anak mencakup segala kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, baik secara lahir maupun batin, serta mendapatkan perlindungan khusus dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. (Susanto, 2021: 43) Sementara itu, remaja merujuk pada individu yang berada dalam rentang usia antara anak dan dewasa, yaitu sekitar 10 hingga 19 tahun. (Patepa, T.I.F.D) Perlindungan remaja melibatkan upaya untuk melindungi hak-hak khusus remaja, seperti hak pendidikan, hak kesehatan, dan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, orang dewasa merujuk pada individu yang telah mencapai usia dewasa, yang umumnya ditetapkan pada usia 18 tahun ke atas. Perlindungan orang dewasa mencakup aspek perlindungan hukum, kesejahteraan, dan hak-hak yang sesuai dengan status dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat yang dewasa.

Ruang lingkup perlindungan yang diamanahkan oleh hukum membentang melintasi berbagai kelompok usia, yaitu anak, remaja, dan dewasa, dengan penekanan pada hak-hak yang dilindungi dan tanggung jawab yang diberikan. Merinci aspek-aspek krusial dari perlindungan anak yang bersifat holistik. Hak hidup menjadi hak dasar pertama yang diakui, menjamin bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan aman. Pendidikan, sebagai hak dasar berikutnya, menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan akses yang setara dan adil terhadap pendidikan formal, membuka peluang untuk pengembangan potensi mereka. Perlindungan dari kekerasan merupakan dimensi penting lainnya, menjamin hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang bebas dari ancaman fisik atau psikologis yang dapat merugikan kesejahteraan mereka. (Herianto dkk : 2020) Tanggung jawab utama yang diamanahkan oleh hukum bagi anak menempatkan beban tanggung jawab pada tiga pilar utama: orang tua, wali, dan negara. Dalam kerangka ini, orang tua memegang peranan sentral sebagai pelindung dan pembimbing pertama anak. Tanggung jawab mereka meliputi aspek kesejahteraan anak, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan asuhan kesehatan. Selain itu, orang tua juga diharapkan memberikan dukungan emosional, pendidikan moral, dan arahan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pada situasi di mana orang tua tidak mampu menjalankan tanggung jawab tersebut, wali menjadi figur penting dalam memastikan kesejahteraan anak. Wali memiliki tanggung jawab yang setara dan bersifat suplemen terhadap peran orang tua. Dalam kedua kasus ini, hukum menetapkan bahwa lingkungan keluarga harus menjadi tempat yang aman, mendukung, dan memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang. Selanjutnya, negara memiliki tanggung jawab puncak dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan keamanan serta kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Negara diharapkan untuk membuat dan menegakkan kebijakan yang mendukung perlindungan anak, termasuk penegakan hukum untuk melindungi anak dari eksploitasi dan kekerasan. Lebih jauh, negara memiliki peran dalam menyediakan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas (Suryana S : 2020), memastikan bahwa setiap anak memiliki peluang yang setara untuk mencapai potensi penuh mereka.

Seiring dengan tahap perkembangan, remaja mengalami perluasan hak-hak yang mencerminkan tingkat kematangan dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hidup mereka. (Octarra dkk: 2022: 14) Hak-hak yang diberikan pada tahap ini mencakup dimensi yang lebih kompleks, mempertimbangkan kebutuhan remaja untuk memahami dan merasakan kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Salah satu hak yang semakin berkembang adalah hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka secara langsung. Hal ini mencakup hak untuk memberikan pendapat, menyuarakan keinginan, dan terlibat dalam proses

pengambilan keputusan yang mencakup keseharian mereka, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat. Selain itu, hak privasi menjadi aspek penting dalam hak-hak remaja. Dalam fase perkembangan ini, remaja mulai membangun identitas pribadi dan merasakan perlunya batasan privasi. Mereka memiliki hak untuk melindungi informasi pribadi mereka dan menentukan sejauh mana informasi tersebut dapat diakses oleh orang lain, termasuk orang tua atau wali. Hak informasi yang relevan juga semakin menjadi perhatian pada tahap perkembangan remaja. Mereka berhak untuk memiliki akses ke informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang informasional dan kontekstual. Ini melibatkan hak untuk mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, pendidikan, dan berbagai aspek kehidupan yang memengaruhi perkembangan mereka. Pemberian hak-hak yang lebih kompleks pada tahap perkembangan remaja mencerminkan upaya untuk menghargai dan mengakui kemandirian mereka, memungkinkan mereka untuk menjadi bagian aktif dalam membentuk arah dan pilihan dalam hidup mereka sendiri. Ini sejalan dengan prinsip bahwa hak-hak remaja tidak hanya memerlukan perlindungan, tetapi juga memberikan ruang untuk partisipasi dan pengambilan keputusan yang semakin bertanggung jawab. Tanggung jawab yang diberikan oleh hukum bagi remaja menitikberatkan pada pendampingan dalam proses pengambilan keputusan dan pemberian dukungan untuk pengembangan potensi mereka. Remaja merupakan kelompok yang tengah menjalani fase transisi menuju kemandirian, dan dalam konteks ini, hukum memberikan kerangka kerja yang memahami kebutuhan unik mereka. Pendampingan dalam pengambilan keputusan mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang relevan, penyertaan dalam proses keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, serta dukungan untuk merumuskan pilihan yang sejalan dengan nilai dan tujuan pribadi mereka. Selain itu, tanggung jawab hukum bagi remaja juga mencakup dukungan untuk pengembangan potensi mereka. Ini mencerminkan pengakuan bahwa remaja merupakan periode penting dalam pembentukan identitas dan kemampuan individu. Hukum memberikan hak kepada remaja untuk mendapatkan akses pendidikan yang bermutu, peluang untuk mengembangkan bakat dan minat, serta dukungan dalam meraih potensi penuh mereka. Dengan cara ini, tanggung jawab hukum bukan hanya terbatas pada perlindungan fisik dan keamanan remaja, tetapi juga melibatkan aspek-aspek yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan positif mereka.

Di sisi lain, perlindungan terhadap dewasa menitikberatkan pada hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial sebagai cermin dari peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam masyarakat. Dewasa dianggap sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan partisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan politik. Oleh karena itu, hak-hak sipil dewasa mencakup hak untuk kebebasan berbicara, hak beragama, dan hak atas privasi yang luas, yang mencerminkan kedewasaan dan otonomi mereka dalam pengambilan keputusan pribadi. Selanjutnya, hak-hak politik memungkinkan dewasa untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokratis, seperti hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk menyuarakan pendapat mereka tentang kebijakan publik. Aspek ekonomi dan sosial dari perlindungan dewasa menyoroti hak untuk mencari pekerjaan, memiliki properti, dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam aspek-aspek kehidupan sehari-hari. Ini mencerminkan fokus pada keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari hak-hak dewasa. Dengan menekankan hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial, perlindungan terhadap dewasa menciptakan kerangka yang mendukung kemandirian dan partisipasi aktif mereka dalam masyarakat. Ini juga mencerminkan prinsip bahwa, sebagai individu yang telah mencapai kedewasaan, dewasa memiliki tanggung jawab untuk mengelola kehidupan mereka sendiri dan berkontribusi pada pembangunan sosial secara keseluruhan. Tanggung jawab yang diberikan oleh hukum bagi dewasa mencirikan sebuah paradigma yang menekankan pada tanggung jawab pribadi terhadap tindakan dan keputusan individu tersebut. Dewasa dianggap memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, dan oleh karena itu, hukum memandang mereka sebagai entitas otonom yang mampu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional dan moral pribadi

mereka. Dalam kerangka ini, tanggung jawab dewasa melibatkan akuntabilitas penuh terhadap konsekuensi dari tindakan dan keputusan yang diambil. Tanggung jawab pribadi ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari tanggung jawab terhadap kepatuhan terhadap hukum, norma-norma etika, hingga tanggung jawab terhadap kehidupan sehari-hari dan hubungan interpersonal. Dewasa diharapkan untuk menjalankan hak-hak dan kewajiban mereka dengan penuh kesadaran, serta mempertimbangkan dampak dari tindakan dan keputusan mereka terhadap diri sendiri dan masyarakat secara lebih luas.

b. Perbandingan Parameter Perlindungan Remaja Dengan Perlindungan Anak dan Perlindungan Orang Dewasa

Dalam membandingkan parameter perlindungan remaja dengan perlindungan anak dan orang dewasa, terdapat beberapa aspek kekhususan yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, perlindungan terhadap anak lebih menekankan pada aspek-aspek seperti hak pendidikan, keamanan, dan perlindungan dari eksploitasi fisik dan seksual. Sedangkan Perlindungan terhadap remaja melibatkan aspek tambahan seperti hak partisipasi dan pengakuan terhadap kemandirian yang menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Remaja memiliki kapasitas untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, sementara orang dewasa dianggap memiliki kemandirian yang lebih besar. Sehingga perlindungan orang dewasa lebih fokus pada hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial tanpa harus mempertimbangkan fase perkembangan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, dalam perlindungan remaja, perlunya memberikan ruang bagi mereka untuk menyuarakan pendapat dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan perlu diperhatikan secara khusus.

Kedua, perlindungan terhadap remaja seringkali melibatkan isu-isu yang lebih kompleks, seperti hak privasi dan hak untuk merumuskan pandangan politik dan moral mereka. Seiring remaja berada dalam fase pencarian identitas, remaja membutuhkan ruang privasi untuk mengembangkan diri tanpa tekanan eksternal yang berlebihan. Hak untuk merumuskan pandangan politik dan moral juga menjadi elemen penting, memberi remaja kebebasan untuk mengeksplorasi dan mengartikulasikan nilai-nilai yang mereka anut. Hak-hak ini tidak hanya menjamin kesejahteraan fisik, tetapi juga mendukung pertumbuhan intelektual dan moral remaja. Di sisi lain, perlindungan hak privasi anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga merupakan tanggung jawab sekolah, lembaga pemerintah, dan penyedia layanan anak. Sebaliknya, orang dewasa dianggap memiliki hak privasi yang lebih mapan dan mandiri. Mereka dianggap mampu untuk menjalani kehidupan secara mandiri tanpa memerlukan pembatasan atau bimbingan yang ketat dari pihak lain.

Ketiga, aspek perlindungan terhadap remaja juga mencakup pemberdayaan melalui pendidikan yang lebih lanjut tentang hak dan tanggung jawab mereka. Pendidikan ini mencakup pemahaman tentang risiko-risiko yang mungkin dihadapi remaja, seperti kekerasan daring dan tekanan sebaya. Perlindungan remaja menciptakan lingkungan di mana mereka didorong untuk aktif berpartisipasi dalam melindungi diri mereka sendiri. Perlindungan anak lebih bersifat paternalistik. Di sisi lain, perlindungan orang dewasa lebih cenderung menekankan tanggung jawab individu terhadap tindakan dan keputusan mereka. Orang dewasa dianggap memiliki kematangan dan pengalaman yang cukup untuk mengelola hidup mereka sendiri, sehingga perlindungan yang diberikan oleh hukum lebih menitikberatkan pada hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial. Hak untuk membuat keputusan pribadi, menjalani kehidupan sesuai kehendak mereka, dan terlibat dalam kegiatan politik menjadi bagian dari perlindungan yang diberikan kepada orang dewasa. Sehingga perlindungan remaja tidak hanya melibatkan tindakan preventif terhadap risiko negatif, tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi tantangan yang mungkin dihadapi selama masa transisi mereka.

Dalam menyusun parameter perlindungan, perbandingan antara remaja, anak, dan orang dewasa perlu mengakui kompleksitas dan kekhasan dari setiap kelompok. (Lestari dkk : 2020: 24) Dengan demikian, melalui pemahaman mendalam mengenai pentingnya mendukung perkembangan psikososial remaja mengindikasikan perlunya membedakan perlindungan remaja dari anak-anak dan orang dewasa. Remaja berada dalam tahap perkembangan yang kritis, di mana identitas dan nilai-nilai hidup mereka mulai terbentuk. Dinamika unik ini mencakup risiko kesehatan mental, eksplorasi identitas, dan tekanan sosial yang memerlukan perhatian khusus. Parameter perlindungan remaja harus dirancang dengan mempertimbangkan kekhususan ini, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan psikososial mereka. Dengan memahami tantangan yang dihadapi remaja, kita dapat merancang langkah-langkah konkret atau rekomendasi untuk memperkuat perlindungan mereka. Ini mencakup penyempurnaan regulasi yang menanggapi kebutuhan remaja secara efektif, serta kampanye sosial yang meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang dihadapi remaja dalam masyarakat.

Langkah-langkah konkret untuk memperkuat perlindungan remaja bisa mencakup penyusunan regulasi yang mempertimbangkan hak-hak khusus mereka, seperti hak privasi dan hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Kampanye sosial dapat fokus pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang tantangan dan tekanan yang dihadapi remaja, dengan tujuan menciptakan dukungan komunitas yang lebih baik. Selain itu, program pendidikan dan pelatihan untuk orang tua, guru, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menjadi langkah efektif untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja secara holistik. Dengan demikian, membedakan perlindungan remaja dan merinci langkah-langkah konkretnya menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan psikososial remaja secara positif.

KESIMPULAN

Ketidaksetaraan perlindungan hukum, terutama terkait dengan remaja, mencerminkan ketidakadilan dalam sistem hukum nasional. Remaja sering menghadapi kendala seperti diskriminasi, keterbatasan akses peradilan, dan perlakuan tidak setara dalam hak dan kewajiban hukum. Pemahaman terhadap ketidakadilan ini menunjukkan perlunya pendekatan rehabilitatif dan pendidikan dalam penanganan kasus hukum remaja. Diperlukan perlindungan hukum yang holistik untuk remaja, termasuk hak pendidikan dan kesehatan, agar mereka dapat berkembang secara menyeluruh. Inisiatif ini tidak hanya bersifat preventif terhadap risiko negatif, tetapi juga membentuk karakter positif melalui lingkungan yang aman dan dukungan psikososial.

Dalam merespon ketidaksetaraan perlindungan hukum terhadap remaja, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bersatu dalam mengadvokasi perubahan menuju sistem hukum yang lebih inklusif dan adil. Dukungan terhadap inisiatif rehabilitatif dan pendidikan perlu diperkuat, serta peningkatan akses remaja ke peradilan harus menjadi prioritas. Pemberdayaan remaja melalui pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab mereka harus ditingkatkan melalui program edukasi yang berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil dapat mempercepat perubahan positif. Peningkatan kesadaran publik terhadap isu ketidaksetaraan perlindungan hukum remaja juga dapat memotivasi pemangku kepentingan untuk bertindak. Dalam merancang kebijakan baru atau mereformasi yang sudah ada, perlu memperhitungkan pandangan langsung dari remaja itu sendiri agar perlindungan yang diimplementasikan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Melalui upaya bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif remaja, memastikan bahwa hak dan kewajiban hukum mereka diakui, dan menciptakan fondasi bagi generasi yang tangguh dan bertanggung jawab dalam masyarakat.

REFERENSI

Buku/Artikel

- Al-Munawar, H. A. H. A., & Rupaida, R. 2020. "Upaya Mengembangkan Kreativitas Remaja", *In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, Vol. 2.
- Habibi, H. 2020. "Peningkatan Kesadaran Hukum Remaja melalui Drama Permainan", *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 4.
- Herianto, E., Jahiban, M., & Dahlan, D. 2020. "Pola Perlindungan Anak dalam Dimensi Sekolah Ramah Anak di Sekolah/Madrasah Kota Mataram", *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, Vol. 6, No. 2.
- Lestari, F., Maylita, F., Hidayah, N., & Junitawati, P. D. 2020. *Memahami Karakteristik Anak*. Madiun: Bayfa Cendekia Indonesia.
- Limbong, R. J. 2020. *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan bagi Kelompok Rentan di Indonesia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Munajat, H. M., & Hum, S. H. M. 2023. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. "Metode Penelitian Hukum", *Mataram: Mataram University Press*.
- Nasution, F., Janani, A., Fadila, A. N., Asmidah, A., & Khairiyani, S. 2023. "Perkembangan Psikososial Masa Kanak-kanak Pertengahan", *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 3.
- Nugraha, K. P. 2023. "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Anak Berdasarkan Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak: Suatu Kajian Terhadap Implementasi dan Tantangan", *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, Vol 1, No 1.
- Nessi Meilan, S. S. T., Maryanah, A. M., & Willa Follona, S. S. T. 2019. *Kesehatan Reproduksi Remaja: Implementasi PKPR dalam Teman Sebaya*. Malang: Wineka Medi.
- Octarra, H. S., Lustitiani, N. S. D., & Ajiuksmo, C. 2022. *Analisis Situasi Partisipasi Anak Dan Remaja Serta Keterlibatan Di Masyarakat Indonesia*. Pkpm Unikaatma Jaya: Unicef Danbappenas.
- Patepa, T. I. F. D. 2020. "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". *Lex Et Societatis*, Vol. 8, No. 4.
- Qamar, D. N., SH, M., Anwar, D. A. I., & SH, M. 2023. *Dikotomi Kajian Ilmu Hukum*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Santriati, A. T. 2020. "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak", *El Wahdah*, Vol. 1, No. 1.
- Suryana, S. 2020. Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan, *Edukasi*, Vol. 14, No. 1.
- Susanto, A. 2021. *Pendidikan Anak Usia Dini: Konsep Dan Teori*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Timoera, D. A., Casmana, A. R., Putra, A. P., & Oktawijaya, F. 2023. "Peningkatan Pemahaman Hukum Remaja Tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Desa Wisata Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia", *Satwika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Internet

Sonya Hellen Sinombor. *Anak dan Remaja Terpapar Perundungan dan Eksploitasi Daring*. Diambil dari kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/12/20/remaja-dan-anak-muda-terpapar-perundungan-dan-eksploitasi-di-ranah-daring>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2023.

Pandu. *Kesadaran Hukum: Pengertian, Faktor, Ciri-Ciri, dan Contohnya Dalam Masyarakat*. Diambil dari gramedia.com: <https://www.gramedia.com/literasi/kesadaran-hukum/>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2023.

Putri. *5 Pembelajaran Hukum yang Harus Diterapkan Bagi Anak Sejak Dini*. Diambil dari idntimes.com: <https://www.idntimes.com/life/family/putri-rahayu/2/pembelajaran-hukum-yang-harus-diterapkan-bagi-anak-sejak-dini-c1c2>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2023.